

"GALAU" MENGHADAPI BKD ONLINE

Oleh: Erfan Ghazali

Satu bulan yang lalu kampus kita kedatangan Irjen Diktis, dan kurang lebih tiga minggu mereka melakukan audit besar-besaran terkait data faktual kinerja Dosen di lingkungan kerja IAIN Syekh Nurjati. *Walhasil*, banyak temuan yang benar-benar menjungkirbalikkan 'gaya dan tradisi' pelaporan BKD yang dipahami secara berjamaah di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kondisi ini kemudian menjadi *trading topic* di sesi obrolan ala warung kopi oleh para dosen di sela-sela waktu senggang mereka. Proses dalam menambal lobang besar yang ditemukan pasca audit melahirkan kebijakan dan peraturan terkait kinerja dosen di kampus tercinta ini dengan bumbu Pro dan kontra yang mengiringi lahirnya kebijakan itu.

Istilah audit selalu disepadankan dengan kata pemeriksaan atau penilaian pelaporan terkait keuangan. adapun konsepsi *auditing* yang dianut dunia ekonomi lebih tajam dari itu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muyadi (2002:9) berikut:

"Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria teoritis, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Kejadian ekonomi yang dimaksud dalam istilah audit dalam konteks kampus adalah hak dan kewajiban diperoleh para pelaku pendidikan di kampus, dan bila dalam tataran dosen maka masuk di dalamnya adalah gaji, intensif, dan pendanaan yang sesuai kriteria yang ditetapkan. Apakah hak yang pantas diterima sesuai kewajiban minimum yang ditentukan? Apakah proses pemberian hak sesuai dengan SOP yang ditentukan? Dapatkah semua dibuktikan? Itulah mungkin sekelumit tujuan *auditing* yang dijalankan.

Bila ditanyakan bagaimana pengalaman di audit itjen, maka jawabannya akan sangat berwarna, tergantung *person* dan satuan yang diperiksa. Bagi mereka yang memenuhi standar minimum, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan pembuktian data otentik terkait kewajiban triDharma perguruan tinggi.

Temuan lapangan terkait BKD menjadi Pekerjaan rumah



Life is Too Short to Waste Time Hating and Blaming Someone

While You Do Nothing...

Do Your Best, Face The Difficulties with Open Minded, and Look For the Solution...

You will be Succeed and Healthier Then...

~Guanidari

Kaizen Sejati adalah buletin Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) yang akan terbit tiap bulan. Buletin ini akan memuat isu-isu faktual, kritis dan aktual yang terjadi di seputar lingkungan akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia diharapkan dapat memberi atmosfir segar bagi perubahan management mutu yang kondusif bagi IAIN. Karena itu, welcome bagi siapa saja yang ingin terlibat dan menyumbangkan tulisannya dalam buletin ini. Buletin ini juga akan menerima comment, respon ataupun kritik terhadap eksistensi buletin ataupun terhadap lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

yang harus di selesaikan secara sistematis dan komprehensif yang kemudian disosialisasikan secara massal. Setidaknya ada dua hal urgen yang menjadi PR besar bagi lembaga: (1) Persepsi Unsur BKD; dan (2) Dokumentasi data.

KESAMAAN PERSEPSI TERKAIT UNSUR BKD

Masih ditemukan perbedaan persepsi dalam mengklasifikasi data baik di kalangan dosen ataupun asessor; apakah terkategori unsur dikjar, pengabdian, atau sebagai penunjang. Sebagai contoh, pemateri atau trainer pada kegiatan Smart Learning dianggap sebagai salah satu unsur pendidikan. Mungkin hal ini disebabkan karena kegiatan Smart Learning berisi materi-materi atau latihan-latihan kemampuan belajar. Namun demikian, hal ini tidak disepakati oleh para asesor. Ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan ini berarah pada pengabdian dosen pada masyarakat kampus karena kegiatan ini tidak masuk dalam hitungan SKS. Dengan demikian, perlu disepakati antar asesor mengenai hal-hal yang masih menimbulkan penafsiran ganda.

Pada bidang penelitian, ada juga unsur yang belum diakomodir dalam buku pedoman perhitungan BKD. Presentasi paper dalam konferensi, misalnya, belum diakomodir dalam buku panduan pengisian BKD. Sudah merupakan hal yang dipahami secara luas di dunia pendidikan tinggi bahwa hasil penelitian, termasuk juga kajian teori, bisa dipresentasikan atau dipublikasikan dalam beberapa forum atau publikasi. Hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan dalam jurnal saja, tetapi bisa juga dalam forum-forum ilmiah seperti konferensi di bidang yang ditekuni oleh dosen yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengetahuan atau ke"gaulan" dosen pada forum-forum ilmiah seringkali kurang dipahami atau disosialisasikan.

Problem ini perlu dituntaskan dalam evaluasi atau urun rembuk dosen yang dilaksanakan secara formal dan di akhiri dengan kesepakatan bersama perihal rambu rambu BKD.

SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN

Upaya menyertakan *softcopy* dokumen berupa surat menyurat (SK, Surat Tugas, Undangan, dll), Ijazah, SAP, Laporan penelitian, materi perkuliahan dan lain-lain di dalam proses pelaporan Kinerja dosen ternyata membuat sebagian dosen 'kelimpungan' harus berhenti sejenak dari rutinitasnya dan beralih pada kegiatan teknis seperti mengubah dokumen dari bentuk *hardcopy* ke bentuk *softcopy*, kemudian mengunggahnya ke piranti lunak (*software*) BKD.

Harus diakui bahwa kondisi era informatika telah mengeser format dokumentasi dalam bentuk kertas ke arah digital. Dan sepertinya sistem pelaporan BKD pun mulai melangkah ke era *BKD online*, sekalipun proses di awal dalam pembiasaan kegiatan ini, para dosen akan disibukkan oleh kegiatan teknis namun bila ini benar-benar terjadi maka kegiatan itu akan menjadi suatu keniscayaan dalam proses pelaporan BKD online. Selain teknis dalam pelaporan yang harus menjadi perhatian adalah struktur bangun dalam sistem manajemen dokumentasi (SMD) elektronik di kampus kita. Sistem manajemen dekomendasi terpadu sangat diperlukan dalam dan menyimpan dan mengelola dokumen riwayat kinerja dosen sehingga nantinya ketika pelaporan BKD telah dilaksanakan oleh para dosen, dokumen-dokumen tetap dapat ditelusuri atau diruntut kembali dengan cepat. Karena faktanya, system BKD yang bersifat manual kurang dapat merekam jejak kinerja dosen yang telah dilakukan pada semester sebelumnya, sehingga banyak dosen 'nakal' yang kembali mengunggah kinerjanya pada semester berikutnya.

Dalam membangun sistem BKD online ini tentu saja tidak mudah. Ia memerlukan infrastruktur yang bersifat integratif antar *link*. Sebagai contoh: IAIN Syekh Nurjati memiliki situs khusus untuk BKD online dosen. Input data untuk unsur BKD harus terintegrasi dalam data database Fakultas, Puslitan (Pusat penelitian dan penerbitan) dan LP2M. Dan ini sangat membutuhkan *cost* yang tidak sedikit. Bukan hanya terkait dengan dana, tapi juga kesiapan Sumber Daya Manusia di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya. Namun demikian, bila ini terwujud, banyak hal yang bisa ambil dalam SMD ini di antaranya : (1) membantu menambah produktivitas pengguna dimana pengguna dapat mengakses dan manage informasi dengan lebih cepat dan tepat; (2) sistem olah data berupa Pencarian file dokumen, update dokumen, dan pendistribusian dokumen digital dapat dilakukan jauh lebih cepat; (3) Mengurangi biaya dokumen dan meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan; (4) Mengurangi resiko kehilangan ataupun kerusakan dokumen; (5) Keamanan dokumen yang handal, Dengan Sistem Manajemen Dokumen, akan dapat diketahui siapa-siapa saja yang berhak membaca dan menerima dokumen yang tersimpan.

Pada akhirnya upaya audit yang telah dilaksanakan oleh itjen terkait Kinerja Dosen dan lembaga perlu disikapi sebagai auto-kritik bagi seluruh civitas akademika dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan Puskom dalam internal lembaga.

BEBAN KERJA DOSEN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN SERDOS

Hasil audit Irjen DIKTIS perdana di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi shock therapy yang sangat signifikan bagi para dosen, asesor, LPM, Pimpinan dan bagian keuangan terkait dengan system pelaporan BKD yang selama ini dilakukan. Demi mendapatkan keterangan lebih jauh tentang hal ini, Tim redaksi berhasil mewawancarai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, Dr. H. Wawan Ridwan, M.Pd. Berikut petikan wawancaranya.

Kedatangan Itjen ke IAIN Sejati pada bulan yang lalu membuat banyak dosen khawatir dengan tunjangan serdos mereka. Apakah hal ini hanya terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon saja? Bagaimana bapak melihat semua ini?

Sebenarnya kedatangan itjen DIKTIS itu bukan hanya ke lembaga IAIN Sejati saja, tapi pada waktu yang bersamaan dan secara serempak, beberapa PTAIN lain pun kena audit. Dalam pertemuan LPM beberapa minggu yang lalu di Jakarta, teman-teman penjaminan mutu juga menghadapi persoalan yang sama. Karena memang system pembayaran serdos di beberapa tempat kadang tidak berbanding lurus dengan penilaian BKD yang dilakukan. Karena itu, orientasi Itjen sebenarnya ingin meluruskan pemahaman yang salah itu, yang selama ini dipahami oleh banyak pihak, bahwa tunjangan serdos itu bukanlah sesuatu yang selalu dan 'melekat' harus didapatkan oleh para dosen, ia sebenarnya merupakan *reward* atas kinerja dosen yang telah memenuhi Beban Kerja nya, bila tidak, maka tunjangan serdos pun tidak dicairkan.

Bukankah selama ini penilaian BKD selalu dilakukan, di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)? Apakah selama ini kurang, bahkan tidak, ada korelasi antara penilaian BKD dengan audit kinerja?

Diakui atau pun tidak, pola kebijakan yang diambil oleh pimpinan seringkali masih mengakomodasi pola toleransi. Sehingga, bila ada dosen yang tidak melaporkan BKD atau pun melaporkan tapi tidak memenuhi, ya... tetap saja mendapatkan tunjangan serdos. Sehingga bisa dikatakan, tidak ada korelasi yang signifikan antara laporan BKD dan pencairan tunjangan serdos. Pola Toleransi ini lah yang akhirnya menjadi 'blunder' tersendiri dan sulit untuk diperbaiki, bila bukan atas intervensi itjen. Bila LPM yang bicara, dianggap 'mempersulit,' sadis dan lain-lain. Karena itu, kedatangan pihak eksternal bagi LPM adalah angin segar yang membantu pelaksanaan system mutu di lembaga kita, khususnya dalam konteks BKD.

Bagaimana dengan audit kinerja para guru besar? Isu yang beredar, beberapa guru besar tidak memenuhi BKD karena double jabatan, tidak melaporkan BKD dan bahkan ada yang tidak mengajar di S-1? Mengapa selama ini tunjangan mereka selalu dicairkan, padahal sudah jelas dalam panduan kemenag DIKTIS, tidak memenuhi dan tidak diperkenankan dicairkan

tunjangan nya? Bagaimana anda melihat hal ini?

Itulah kenapa saya katakan blunder tadi, termasuk pencairan serdos bagi guru besar yang double jabatan, tidak mengajar di S-1 dan tidak melaporkan tugas khusus professor nya. System kolegial membuat kebijakan pimpinan menjadi terlalu toleran dan akomodatif. Saya bisa memahami hal ini, karena *political oriented* di lembaga kita masih dominan, dimana pimpinan masih senantiasa bernegosiasi dalam pelaksanaan system mutu. Tapi dengan datangnya itjen dan beberapa konsekuensi sanksi bagi pimpinan dan LPM, lembaga kini dituntut untuk semakin 'tegas' dalam konteks ini.

Beberapa dosen sekarang ini mengeluhkan pencairan tunjangan profesi dosen yang tertangkal selama hampir 2-3 bulan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam konteks ini?

Semua harus bertanggung jawab. Pimpinan dituntut komitmennya untuk segera lebih mengambil kebijakan tegas dalam mengeksekusi siapa yang layak mendapatkan tunjangan serdos. LPM dituntut lebih selektif mengawal para asesor internal BKD dalam melakukan penilaian. Para dosen dituntut untuk melaksanakan kinerjanya dengan baik, dan melaporkan BKD sesuai dengan standar internal yang ditetapkan dan *on time*, sehingga tidak mengganggu pencairan serdos dosen lainnya.

ITJEN suatu saat akan kembali melakukan audit, kira-kira harapan Anda ke depan agar para dosen siap dan tidak takut untuk diaudit?

Ada banyak persiapan yang kami harus lakukan ke depan: (1) Penyusunan Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai pedoman internal lembaga. Ini penting... menurut pengakuan beberapa teman di penjaminan mutu, Itjen yang melakukan audit kadang memiliki standar yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, IAIN harus memiliki standar internal yang disepakati bersama dan menjadi acuan. Kita tidak akan disalahkan bila telah memiliki pedoman internal yang jelas. Itjen hanya akan menyesuaikan apa yang dibuat dan yang terimplementasi di lapangan. (2) Beberapa kendala yang terjadi kemarin ini adalah banyaknya dokumen yang hilang, lemari LPM pun sudah penuh dengan

berkas BKD para dosen. Karena itu, bersama dengan DATA CENTER, LPM akan terus melakukan pembaharuan system pelaporan yang lebih *paperless*. Ini sebagai persiapan saat aplikasi BKD *online* dari KEMENAG jadi, sistem manajemen dokumentasi (SMD) elektronik di kampus kita bisa langsung *nge-link* ke sana. Dengan Sistem ini, dokumen riwayat kinerja dosen akan selalu tersimpan dan bisa senantiasa di *update*, bahkan bisa menjadi database bagi penyusunan

borang akreditasi prodi dan kenaikan PAK dari masing-masing dosen. Karena memang ke depan, secara nasional, BKD akan terintegrasi dengan kenaikan pangkat para dosen sendiri. *Bismillah...* meski belum ada budget untuk itu, kita tetap akan terus mencari solusi untuk mengimplementasikannya. Hanya saja, harapan kami dari pihak LPM, para dosen harus belajar memahami proses ini, tidak mudah menyalahkan dan akomodatif terhadap setiap proses perubahan.

t . e . r . o . p . o . n . g

SISTEM PENJAMINAN MUTU SECARA ONLINE

Memasuki tahun ke 3 pengembangan sistem penjaminan mutu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati bersama Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) merambah pada penambahan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang kualitas perguruan tinggi secara online dimana mutu perguruan tinggi dapat dipantau setiap saat setiap ada perubahan data dari *user*. Adapun standar acuan pengembangan sistem penjaminan mutu secara online yaitu dari borang akreditasi BAN PT agar dapat pengakuan secara nasional sedangkan untuk menuju pengakuan internasional pengembangan sistem penjaminan mutu mengikuti standar *Webometrics* serta 4ICU.

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), yang dalam hal ini sebagai mitra pendukung LPM, melakukan pengembangan teknologi terkini yang *adaptif* terhadap perkembangan aturan serta perubahan teknologi yang semakin canggih dengan menciptakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Online. Dalam Sistem ini, seluruh komponen harus terintegrasi dari mulai proses penerimaan mahasiswa baru, Proses akademik hingga tracer alumni yang semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam proses akademik dosen dilengkapi dengan aplikasi penunjang sehingga dapat memberikan seluruh materi secara online, pengecekan jadwal, kehadiran mahasiswa, daftar hadir mengajar serta penilaian sudah dapat dilakukan secara online sehingga kecepatan informasi dapat diukur karena setiap tindakan tercatat oleh sistem dan berdampak pada penilaian kinerja dosen. Mahasiswa pun dapat menilai secara langsung kinerja dosen serta memberikan penilaian terhadap pelayanan staf jurusan, fakultas, perpustakaan hingga rektorat agar bisa selalu meningkatkan pelayanannya. Hasil penilaian dipublish secara online melalui website www.iaincirebon.ac.id dan stakeholder dapat menilai secara langsung dan transparan.

Untuk perbaikan secara internal, seluruh struktur manajemen seperti Ketua Jurusan/Prodi, Dekan, LPM, dan Rektor diberikan *dashboard report online* sebagai sistem penunjang keputusan yang berisi statistik deskriptif tentang kinerja perguruan tinggi seperti demografi mahasiswa, prestasi mahasiswa, Analisis data SDM, Analisis data Matakuliah, analisis data calon mahasiswa serta analisis data alumni sesuai dengan yang dibutuhkan manajemen.



Penanggung Jawab : H. Sumanta. Redaktur: Septi Gumindari. Penyunting/Editor: Hasan Saefullah. Kesekretariatan: Diana Djuwita, Budi Manfaat, Agus Setiawan. Asep Rizky, Hamdan. Bag. Distribusi: Masriyah, Muhsin Riyadi, Anggara Disuma. Alamat redaksi: Ruang Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), gedung Rektorat Lt I IAIN Syekh Nurjati Cirebon 45132 telp (0231) 481264-113 | email: kaizen_sejati@yahoo.com